

**SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

**Dr. Asran Jalal, M.Si**

**(Dosen, sekolah Pascasarjana UNAS, Program Studi Ilmu Politik NIDN: 0328106101)**

**MAKALAH DISAMPAIKAN PADA BEDAH BUKU:**

**Lili Romli, berjudul: Sistem Presidensial Indonesia Dinamika, Problematik, dan Penguatan Kelembagaan. Diselenggaran oleh Asosiasi Ilmu Politik (AIPI) DKI Jakarta, Sekolah Pasca Sarjana UNAS, FISIP-UKI, FISIP UBK dan FISIP- UMJ, Kamis, 22 Oktober 2020 Melalui Webinar.**

1. **PENDAHULUAN**

Masa Orde Baru, minat ilmuwan politik Indonesia melakukan studi tentang kelembagaan presiden Indonesia tergolong sedikit. Penyebabnya antara lain adalah sulitnya memperoleh data yang akurat, selain mempublikasikan dan mendiskusikan karya memiliki resiko, terutama apabila bersentuhan dengan kekuasaan dan bisnis Presiden Soeharto. Karya ilmuwan politik dengan fokus kekuasaan presiden atau lembaga kepresidenan hanya terdapat dua karya dalam bentuk artikel dalam buku, yang ditulis oleh Afan Gafar dan Mohtar Mas’oed.

Kedua ilmuwan ini memusatkan pandangannya pada proses menguatnya lembaga presiden masa Orde Baru. Menurut Afan Gaffar menguatnya kekuasaan Presiden Soeharto masa Orde Baru, karena memiliki dua sumber kekuasaan yaitu: (1) mengontrol rekruitmen politik; (2) memiliki sumber daya keuangan yang besar. [[1]](#footnote-1) Mohtar Mas’oed, menguatnya kekuasaan Jenderal Soeharto masa Orde baru, bersumber dari dua hal yaitu: (1) memanfaatkan dua wewenang khusus yang diperoleh dari Presiden Soekarno; (2) kemampuan membina sumber keuangan sendiri untuk tujuan patronase.[[2]](#footnote-2)

Pasca-Orde Baru, terutama pasca-amandamen UUD 1945, gairah para ilmuwan politik melakukan studi dengan fokus kekuasaan presiden dalam politik Indonesia semakin besar. Faktornya adalah memperoleh data, menulis, mempublikasikannya, dan mendiskusikan hasilnya dapat dilakukan secara bebas sesuai standar akademik. Realitas politik yang tejadi, model sistem pemerintahan peresidensial berdampingan dengan sistem banyak partai yang dianut Indonesia pasca-Presiden Soeharto, menimbulkan dinamika dan problem, ikut memperbesar rangsangan para ilmuwa politik untuk mempelajarinya.

Beberapa hasil studi yang tersedia dalam bentuk buku berisikan percikan pemikiran beberapa ilmuwan politik antara lain buku yang berjudul “Sistem Presdensial & Sosok Presiden Ideal” disunting oleh Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti pada tahun 2009.[[3]](#footnote-3) Buku yang berjudul *“*Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno Ke Jokowi”, diedit oleh Sarah Nuraini Siregar, tahun 2018.[[4]](#footnote-4)

Pandangan ilmuwan politik dalam bentuk artikel dalam jurnal antara lain ditulis oleh Burhan D. Magenda, berjudul,”Dinamika Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif dalam Politik Ketatanegaraan Indonesia”, tahun 2007.[[5]](#footnote-5) Artikel Ramlan Surbakti berjudul Membangun pemerintahan Presidensial yang Efektif Melalui Desain Pemilu”.[[6]](#footnote-6) Hasil studi dalam bentuk disertasi ditulis oleh Syamsuddin Haris, pada tahun 2008.[[7]](#footnote-7)

Studi dalam bentuk buku ditulis secara mandiri dilakukan oleh Lili Romli, berjudul “Sistem Presidensial Indonesia Dinamika, Problematik, dan Penguatan Kelembagaan*”*, tahun 2019.[[8]](#footnote-8) Karya-karya tersebut di atas cukup memberikan bukti, tinginya gairah para ilmuwan politik melakukan studi tentang kekuasan presiden di Indonesia pasca-Presiden Soeharto dalam format sistem presidensial berdampingan dengan sistem banyak partai.

1. **Diskusi Buku**

Studi-studi yang diuraikan tersebut di atas, hanya Lili Romli berhasil menulis buku secara mandiri, dengan jumlah sebanyak 154 halaman. Karya tersebut membuktikan Lili Romli sebagai seorang ilmuwan politik menaruh perhatian yang tinggi terhadap maslah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan bidang studi yang diminati.

 Studi-studi ilmuwan politik tersebut di atas, memilih jalur memperbaiki kelembagaan yang tersedia sebagai solusi guna memantapkan model sistem presidensial yang stabil. Solusi dimaksud antara lain, menaikkan ambang batas *(electoral threshold*) perolehan suara partai politik setiap pemilihan umum (Pemilu), koalasi partai-partai pendukung presiden dan oposisi secara permanen, Pemilu Presiden Pemilu DPR secara serentak, dan lainnya.

 Lili Romli dalam bukunnya terkamasuk dalam arus pemikiran ini. Gagasan Lili Romli untuk memperkuat model sistem presidensial berdampingan dengan banyak partai di Indonesia yaitu: (1) penguatan kedudukan presiden dengan cara mengembalikan kewenangan presiden yang dintervensi DPR; (2) pelembagaan koalisi berbasis platform, yang diikat dengan kontrak politik dan dilakukan secara transparan sampai akhir pemerintahan; (3) Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu legislatif (Pileg) secara serentak; (4) penyederhaan sistem kepartaian melalui sistem distrik.[[9]](#footnote-9)

Pembahas dalam kesempatan diskusi buku Lili Romli ini, hendak numpang ikut urun-rembuk dengan mengemukakan gagasan sejalan arus pemikiran para ilmuwan politik tersbut di atas. Membangun sistem presidensial yang stabil, presiden dapat mengambil inisiatif melakukan pertemuan informal dengan ketua-ketua partai politik, koalisi, bila perlu termasuk ketua partai non-koalisi melakukan urun-rembuk terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis dan mengundang polemik. Pertimbangannya adalah anggota-anggota DPR pada dasarnya tunduk pada ketua partai. Masyarakat Indonesia dalam semua tingkat menghargai prinsip musyawarah, termasuk dalam mengelola negara, apalagi sejalan dengan prinsip ideologi Pancasila sila ke 4 yang berbunyi” Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.

Pertimbangan lainnya adalah jumlah Ketua Partai dapat dihitung dengan jari, Pasca-Pemilu tahun 2019 hanya berjumlah 9 orang, yaitu: (1) Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP; (2) Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar; (3) Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra; (4) Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB; (5) Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem; (6) Ahmad Syaikhu sebagai Ketua Presiden PKS; (7) Agus Hari Murti Yudhoyono sebagai ketua Umum Partai Demokrat; (8) Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN; (9) Manoarfa sebagai Ketua Umum PPP. Jumlah Ketua Partai yang sedikit, tidaklah sesuatu yang sulit bagi presiden untuk melakukan urun-rembuk secara terbuka, apalagi 3 dari 9 Ketua Partai menjadi menteri.

**PENUTUP**

 Buku karya Lili Romli ini perlu mendapat apresiasi, karena ikut berkontribusi dalam memperkaya studi ilmu politik di Indonesia. Buku ini layak dibaca oleh mahasiswa, politisi dan masyarakat umum yang berminat terhadap pengetahuan politik, karena buku ini kaya dengan informasi dan sumber bacaan. Sukses Lili Romli, sukses AIPI- Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Gaffar, Afan (1999), *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi,* Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Haris, Syamsuddin (2008), *Format Baru Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi*

*Presidensial Indonesia Pasca-Amandemen Konstitusi (2004-2008),* Disertasi Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik.

Mas’oed, Mohtar (1996), “Lembaga Kepresidenan dan Resep Pengendalian Politik

Indonesia”, dalam Reza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Magenda,, Burhan D. *Dinamika Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif Dalam Politik*

*Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Gloria Juris, Volume 07 No.02, Mei-Agustus 2007,

h.115-136.

Nurhasim, Moch.dan Ikrar Nusa Bhakti (Penyunting) (2009), *Sistem Presdensial & Sosok*

*Presiden Ideal*, Pustaka Pelajar AIPI, Yogyakarta.

Romli, Lili (2019), *Sistem Presidensial Indonesia Dinamika, Problematik, dan*

*Penguatan Kelembagaan*, Malang: Setara Press.

Siregar, Sarah Nuraini (ed) (2018), *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno Ke*

*Jokowi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Surbakti, Ramlan,“ Membangun pemerintahan Presidensial yang Efektif Melalui Desain

Pemilu”, *Partnership Policy Paper*, No.3, 2011.

1. Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, BAB 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mohtar Mas’oed, “Lembaga Kepresidenan dan Resep Pengendalian Politik Indonesia”, dalam Reza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, BAB 5

*Ibid*, h. 97-98. [↑](#footnote-ref-2)
3. Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti (Penyunting) (2009), *Sistem Presdensial & Sosok Presiden Ideal*, Pustaka Pelajar AIPI, Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sarah Nuraini Siregar (ed), *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno Ke Jokowi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018. [↑](#footnote-ref-4)
5. Burhan D. Magenda, *Dinamika Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif Dalam Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Gloria Juris, Volume 07 No.02, Mei-Agustus 2007, h.115-136. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ramlan Surbakti,“Membangun pemerintahan Presidensial yang Efektif Melalui Desain Pemilu”, *Partnership Policy Paper*, No.3, 2011. [↑](#footnote-ref-6)
7. Syamsuddin Haris, *Format Baru Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial Indonesia Pasca-Amandemen Konstitusi (2004-2008),* Disertasi Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik, 2008. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lili Romli, *Sistem Presidensial Indonesia Dinamika, Problematik, dan Penguatan Kelembagaan*, Malang: Setara Press, 2019. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*, h. 53-63. [↑](#footnote-ref-9)